

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Likuiditas

2.1.1.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012:205), likuiditas adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut”.

Menurut Kasmir (2012:110), definisi likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek”.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, menurut Subramanyam (2012:185) definisi likuiditas adalah:

“Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek)”.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014: 37) likuiditas adalah

“Rasio Likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya”.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas ini cukup memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dari hasil rasio likuiditas menurut Kasmir (2012:132) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
- c. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- e. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
- f. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- g. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
- h. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.

2.1.1.3 Metode Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2012:134-137) Ada beberapa jenis metode pengukuran rasio likuiditas, sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test*)
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Current ratio atau rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. (Kasmir:134). Rasio lancar menunjukkan apakah tuntutan dari kreditur jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi aktiva lancar dalam periode yang sama dengan jatuh temponya utang. *Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadi masalah dalam likuiditas. Sebaliknya suatu perusahaan yang memiliki rasio lancar terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampulabaan perusahaan (Mamduh dan Abdul Halim, 2014:202).

Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh temp. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar (Kasmir, 2014:132).

Menurut Van Horn and Watchowic (2012:206), *Current ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{current Asset}}{\text{current Liabilities}} \times 100$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test*)

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya paling rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan sering menimbulkan kerugian jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio cair (*quick ratio*), nilai persediaan dikeluarkan dari aktiva cair (Kasmir, 2012:135).

Menurut Kasmir (2012:135), Rumus untuk mencari Rasio cepat:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Quick ratio or acid test lebih baik dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena dalam perhitungannya semua unsur-unsur persediaan dikurangkan atau dianggap tidak digunakan untuk membayar utang jangka pendek (Mamduh dan Abdul Halim, 2014:202)..

Menurut Kasmir (2012:136) menyatakan bahwa “Quick Ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas adalah perbandingan antara aktiva lancar yang benar-benar likuid (yaitu dana kas) dengan kewajiban jangka pendek(Kasmir, 2012:136).

Menurut Kasmir (2012:136), Rasio kas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or cash equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Dari rumus tersebut terlihat bahwa persediaan dan piutang dagang yang kurang likuid harus dikeluarkan dari aktiva lancar, sehingga pembayaran kewajiban jangka pendek hanya bersumber dari kas dan setara kas (efek-efek).

Menurut Khasmir (2012 : 138) Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang- utang jangka pendek nya.

Indikator yang dipakai adalah Rasio Lancar. Alasannya, Rasio Lancar dapat mengukur seluruh total kekayaan perusahaan dan jumlah uang *Liquid* yang tersedia dalam perusahaan baik untuk operasional maupun untuk membayar hutang jangka pendek.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2011:122), definisi profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014: 42) profitabilitas adalah:

“Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (Profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan

modal saham tertentu”.

Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2012:72), adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu”.

Sedangkan menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2010:107), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.”

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio Profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2012:197-98), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Menurut Kasmir (2012: 198), manfaat yang diperoleh adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.2.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2011:122-128), Ada beberapa jenis metode pengukuran rasio profitabilitas sebagai berikut:

- “1. Net Profit Margin (NFM)
2. Return On Investment (ROI)
3. Return On Equity (ROE)
4. Return On Aset (ROA)”.

Adapun Penjelasannya sebagai berikut:

1. Net Profit Margin

Hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan sampai cukup berhasil dalam memulihkan/mengendalikan harga pokok barang dagangan/jasa, beban operasi, penyusutan, bunga pinjaman dan pajak. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan manajemen untuk menyisihkan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik perusahaan yang tetap menyediakan modalnya dengan suatu resiko.

Menurut Agus Sartono(2011:122), Secara sederhana margin laba bersih dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Net profit Margin} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak (EAT)}}{\text{penjualan bersih}}$$

2. Return On Investment

Return on Investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset. *Return on Investment* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan.

Menurut Agus Sartono(2011:123), *Return on Investment*. Dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

3. Return on Equity (ROE)

Rasio *return on equity* memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, serta mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.

Menurut Agus Sartono(2011:124), Rasio ini dihitung dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

4. Return On Asset (ROA)

Return On Assets merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. *Return on assets (ROA)* dipengaruhi dua faktor, yaitu laba bersih dan total aktiva. Dimana secara teoritis untuk meningkatkan ROA dapat dilakukan dengan meningkatkan laba bersih setelah pajak dan mengurangi total aktiva yang diinvestasikan (ditanamkan) perusahaan.

Menurut Agus Sartono(2011:122) ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran profitabilitas adalah *Return On Assets*. Alasan pemakaian *Return On Assets* Karena Rasio ini dapat menggambarkan potensi keuntungan perusahaan yang didapat sehingga dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan. Dengan begitu, maka dapat menarik investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan

2.1.3 Solvabilitas

2.1.3.1 Pengertian Solvabilitas

Menurut van Horne dan Wachoviz (2012:233) mendefinisikan:

“Rasio solvabilitas atau *leverage* adalah mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut”.

Menurut Brigham dan Houston (2010:140) ,definisi solvabilitas adalah:

“rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*).”

Menurut Kasmir (2012 : 151), definisi solvabilitas adalah:

“rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang”.

Sedangkan Menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:40), definisi Solvabilitas atau *Leverage* adalah:

“Rasio solvabilitas atau *Leverage* adalah mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang”.

2.1.3.2 Tujuan Solvabilitas

Menurut Kasmir (2012: 153), Ada beberapa tujuan solvabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki”.

2.1.3.3 Metode Pengukuran Solvabilitas

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun Metode Pengukuran yang ada dalam rasio solvabilitas menurut Van horne (2012:234-238) adalah:

1. *Debt to Asset Ratio (DAR)*
2. *Debt to Equity Ratio (DER)*
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*
4. *Time Interest Earned*
5. *Fixed Charged Coverage*

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (DAR)* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Van horne, 2012:234). Dari hasil pengukuran apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang.

Menurut Kasmir (2012:151), Rumusan untuk mencari *debt to asset ratio* dapat digunakan sebagai berikut :

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Aset} \times 100$$

2. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. (Van horne, 2012:235)

Menurut Van horne (2012:234), Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}} \times 100$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio* merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan (Van horne, 2012:237),

Menurut Van horne (2012:237), Rumusan untuk mencari *Long Term Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

4. Menurut J. Fred Weston yang dikutip oleh Kasmir (2012 : 160) *Time Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Home juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Jumlah kali perolehan bunga atau *Time Interest Earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya (Van horne, 2012:238),. Untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang

dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

Menurut Van horne (2012:238), Rumus untuk mencari *Time Interest Earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{Earning Before Income Tax (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

5. *Fixed Charged Coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Time Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang (Van horne,2012:238),.

Menurut Van horne (2012:238), Rumus untuk mencari *Fixed Charged Coverage*(FCC) adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charged Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran solvabilitas adalah *debt to Asset Ratio* asset merupakan gambaran dari kekayaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Apabila nilainya kecil, Hal ini akan dijadikan acuan oleh investor maupun kreditor dalam menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang mereka anggap memiliki kinerja keuangan yang baik.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2015:280) adalah sebagai berikut:

“ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, berapa total nilai penjualan, nilai kapitalisasi pasar, banyaknya tenaga kerja dan lain sebagainya”.

Definisi ukuran perusahaan menurut Kharisma dwi Citra(2014) adalah sebagai berikut:

“ukuran perusahaan dapat dilihat dari total nilai aset, berapa total nilai penjualan, nilai kapitalisasi pasar, banyaknya tenaga kerja dan lain sebagainya”.

Adapun definisi ukuran perusahaan menurut Khiyanda (2013, 7) adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, yaitu: *total assets, log size*, nilai pasar saham dan lain”.

Pendapat yang tidak berbeda jauh juga dikemukakan oleh Kharisma (2014), definisi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

”Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi

2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Menurut UU No. 20 tahun 2008, definisi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomiproduktif yang dilakukan oleh badan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasionalmilik

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adanya keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal mengenai besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan dapat diketahui bahwa semakin besar total aset menggambarkan semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No.11/PM/1997 Pasal 1 Ayat 1a yang berbunyi:

“Perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan aset (Total Aset) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)”.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Tingkatan Skala Perusahaan

Skala Perusahaan	Tingkat Tenaga Kerja	Tingkat Penjualan
Perusahaan Kecil	5-19 orang	< Rp. 3 Miliar
Perusahaan Sedang	20-99 orang	Rp. 3 Miliar – Rp. 10 Miliar
Perusahaan Besar	100 orang	> Rp. 10 Miliar

Menteri Perindustrian dengan SK No.13/M/SK-1/8/1990 tanggal 14 Maret 1990 mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan pada nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa

“Kriteria bidang usaha dengan kelompok industri kecil adalah (a) nilai kekayaan perusahaan seluruhnya tidak lebih dari Rp. 600.000.000 (Enam

Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati (b) Pemilih adalah warga negara Indonesia”.

Adapun Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008, Bab IV pasal 6 dijelaskan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Kekayaan Bersih(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) (dalam Rupiah)	Penjualan Tahunan (DalamRupiah)
Usaha Mikro	< 50 Juta	< 300 Juta
Usaha Kecil	50 Juta - 500 Juta	300 Juta - 25 Miliar
Usaha Menengah	500 Juta - 10 Miliar	2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber:UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil, menengah (UMKM)

2.1.4.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto (2015:282), ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan,ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Menurut Khiyanda (2013, 7) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, yaitu: *total assets*, *log size*, nilai pasar saham dan lain.

Menurut Restu Wulan (2013:33), ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Jumlah Tenaga Kerja
2. Total Penjualan
3. Total Utang ditambah dengan nilai pasar saham Biasa
4. Total Aset

Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran ukuran perusahaan adalah Logaritma Total Aset. Indikator ini dipilih karena menggambarkan kekayaan perusahaan. Hal ini akan memancing investor ataupun kreditor untuk menanamkan modal mereka. Suatu perusahaan yang besar hanya akan punya pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, juga memiliki kemungkinan profitabilitas yang lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan di industri. Sehingga baik investor ataupun kreditor akan mendapat untung.

2.1.5 Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

2.1.5.1 Laporan Keuangan

2.1.5.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:4), definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan keuangan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Menurut Weygandt dan Kieso (2012:5), definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang”.

Menurut Soemarsono S.R (2012:130), definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“ Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Laporan Keuangan dapat disusun dengan menggunakan Neraca Lajur sebagai dasar.”

2.1.5.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:5) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karenan secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atas sumber daya yang dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung awaban manajemen berbuat

demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

2.1.5.1.3 Jenis Laporan Keuangan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2015:01.6), laporan keuangan terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan atau Neraca
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Adapun Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Neraca (Laporan posisi keuangan)

Pengertian neraca menurut Sofyan Syafri Harahap (2010;107) yaitu:

“Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi asset, liabilitas, dan ekuitas pada saat tertentu”.

Arti dari posisi keuangan yang dimaksud berupa posisi jumlah dan jenis aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada saat tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi (jumlah dan jenis) harta, utang, dan modal perusahaan. Dan juga neraca dibuat dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan, namun neraca biasanya dibuat pada akhir tahun atau kuartal. Neraca dimaksudkan untuk membantu pihak eksternal untuk menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas perusahaan, kemampuan operasional dan kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu, pengukuran yang dilakukan didalam

neraca berdasarkan *fair value*. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen yang mudah dicairkan.

Komponen yang ada dalam suatu aktiva yaitu :

- a. Aktiva lancar yang terdiri dari : kas, rekening pada bank, deposito berjangka, surat berharga, piutang, pinjaman yang diberikan, persediaan, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima.
- b. Aktiva tetap yang terdiri dari : aktiva tetap berwujud (tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan) dan aktiva tetap tidak berwujud (Goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang).
- c. Aktiva lainnya terdiri dari : gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang muka investasi.

Komponen kewajiban yang ada dalam neraca yaitu :

- a. Kewajiban Lancar (Utang Jangka Pendek) yang terdiri dari : utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, utang gaji.
- b. Utang Jangka Panjang yang terdiri dari : utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang.

Komponen Modal yaitu :

- a. Modal Saham
- b. Agio Saham

- c. Laba Ditahan
- d. Cadangan Laba
- e. Modal Sumbangan

Informasi yang disajikan dalam neraca meliputi :

- a. Jenis-jenis aktiva atau harta yang dimiliki (*Asset*)
- b. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva
- c. Jenis-jenis kewajiban atau utang (*Liability*)
- d. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban
- e. Jenis-jenis modal (*Equity*)
- f. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2015:01.3) laba rugi adalah :

“Laba Rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain”.

Sedangkan menurut Kieso (2012:164) yang dimaksud dengan laba rugi komprehensif atau *comprehensive income* adalah:

“Laba komprehensif meliputi semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan akibat investasi oleh pemilik dan distribusi Komprehensif kepada pemilik. Karena itu, laba komprehensif meliputi semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan dan kerugian yang tidak dimasukkan dalam laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas pemegang saham”.

3. Laporan Perubahan Modal

Merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada

saat ini. Laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal di perusahaan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (2009:01.13) dinyatakan bahwa:

“Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan”.

Informasi yang diberikan dalam laporan laba rugi meliputi :

- a. Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada pada saat ini
 - b. Jumlah rupiah tiap jenis modal
 - c. Jumlah rupiah modal yang berubah
 - d. Sebab-sebab berubahnya modal
 - e. Jumlah rupiah modal sesudah perubahan
4. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Kas masuk terdiri uang yang masuk ke perusahaan, misalnya hasil dari

penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluaran seperti pembayaran biaya operasional perusahaan.

5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2015:01.13) menyatakan bahwa:

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam pernyataan Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar”.

Catatan laporan keuangan mengungkapkan :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain,

2.1.5.2 Waktu Penyajian Laporan Keuangan

2.1.5.2.1 Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu. Owusu-Ansah (2000) dalam Khiyanda (2013), menyatakan bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dapat berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan tidak *out of date* dan informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut baik. Kerelevanan suatu laporan keuangan dapat diperoleh apabila laporan keuangan tersebut dapat disajikan dengan tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan

yang penting pada publikasi laporan keuangan. Hendriksen (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Baridwan (2000) dalam Khiyanda (2013), menyatakan bahwa tepat waktu diartikan sebagai informasi yang harus sampai sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya keputusan-keputusan tersebut. Sesuai dengan peraturan X.K.2 yang diterbitkan BAPEPAM terdahulu dan didukung oleh peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan, X.K.6 tertanggal 1 Agustus 2012, maka pelaporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Ketepatan waktu dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan yg tepat waktu.

2.1.5.2.2 PERATURAN PELAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA

Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada OJK (Dulu bernama Bapepam). Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala.

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

Tanggal 1 Agustus 2012 BAPEPAM dan LK mengeluarkan peraturan Nomor: KEP-431/BL/2012 dengan lampiran Nomor X.K.6. emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan dalam laman (*website*) emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampainya laporan tahunan tersebut kepada BAPEPAM dan LK.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Hilmi dan Ali (2008)	Analisis faktor-faktor profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan	Regresi Berganda	profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi KAP mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan <i>leverage</i> keuangan, ukuran perusahaan, dan

	publik, reputasi KAP, dan opini auditor yang mempengaruhi ketepatan Waktu Laporan keuangan		opini auditor tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Rini Dwiyanti (2010)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Statistik Deskriptif Regresi logistik Koefisien Regresi	Profitabilitas dan struktur kepemilikan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan leverage keuangan, kualitas auditor, dan pergantian auditor tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Khiyanda Alfian Nasution (2013)	Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011	Statistik Deskriptif Regresi logistik Koefisien Regresi	Likuiditas dan profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
Ade Putri Handayani dan Made Gede Wirakusuma (2013)	Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Reputasi Kantor Akuntan Publik Pada Ketidaktepatw	Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Regresi berganda	Solvabilitas dan Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan pada ketidaktepatan waktu publikasi laporan keuangan. Profitabilitas tidak berpengaruh pada ketidaktepatan waktu publikasi laporan keuangan

	aktuan Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan di BEI		
Santi Mulyasari (2014)	Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Laporan Keuangan pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2009-2013	Statistik Deskriptif Regresi logistik Koefisien Regresi	likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3 Kerangka Pemikiran

Ketepatan Waktu yang diungkapkan Gregory dan Van Horn (2012), menyatakan bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dapat berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan

tidak *out of date* dan informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut baik.

Hendriksen dalam Khiyanda (2013) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Setiap perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Menurut Keputusan Ketua OJK Nomor 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dalam lampirannya, yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan. Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak perusahaan yang tidak tepat waktu atau terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaannya. Oleh karena itu, keterlambatan pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

Likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. (Mamduh M. Hanafi dan Halim, 2014: 37). Rasio likuiditas akan memberikan gambaran apakah perusahaan itu liquid atau tidak. Artinya, jika kewajiban jangka pendek jatuh tempo, mampukah perusahaan mengatasi masalah tersebut.

Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan oleh rasio lancar yaitu membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat memberikan sebuah ukuran likuiditas yang cepat, mudah digunakan dan mampu menjadi indikator terbaik dari sampai sejauh mana klaim dari kreditor jangka pendek telah ditutupi oleh aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup cepat (Brigham dan Houston, 2010: 132)

Likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Apabila perbandingan aset lancar dengan hutang lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Menurut penelitian Listiana dan Susilo (2012), menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi memiliki risiko yang lebih kecil terhadap kemungkinan terjadinya gagal bayar atas utang jangka pendek perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga pihak manajemen meminta auditor lebih cepat dalam menyelesaikan audit terhadap laporan keuangan,

sehingga kabar baik tersebut dapat disampaikan secara tepat waktu dan berguna bagi pengguna laporan keuangan perusahaan.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian Khiyanda (2013) yang mengungkapkan Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik (good news) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Mega, Muhamad, dan anisa (2016) juga melakukan penelitian tentang hubungan tingkat likuiditas suatu perusahaan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan ditemukan bukti empiris bahwa likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi modal itu sendiri. Profitabilitas adalah Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. (Agus Sartono, 2011: 122). Profitabilitas juga digunakan sebagai indikator keberhasilan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas

suatu perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tersebut mengandung berita baik (*good news*). Perusahaan yang laporannya berisikan berita baik akan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Merlina Toding (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin baik kondisi perusahaan. Hal ini memacu perusahaan ingin mempercepat penyampaian laporan keuangannya ke publik.

Selain itu, Rensi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mempunyai berita baik akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya.

Hal yang sama juga dikemukakan Adrian (2016) dalam penelitiannya bahwa profitabilitas yang tinggi merupakan sinyal yang baik dan dapat menjadi berita baik, sehingga perusahaan cenderung untuk melaporkan laporan keuangannya secara lebih cepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2.3.3 Pengaruh Solvabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

Rasio solvabilitas atau *leverage* adalah mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut (van Horne, 2012:233). Menurut Hanafi dan Halim (2014) Perusahaan yang mempunyai tingkat solvabilitas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mengandung berita buruk (*bad news*). Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai tingkat solvabilitas yang tinggi akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya untuk menghindari reaksi yang kurang baik dari investor. Perusahaan yang mempunyai tingkat solvabilitas yang rendah akan menghasilkan laporan keuangan yang mengandung berita baik (*good news*), sehingga perusahaan tersebut akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Penelitian Tritia dan Bambang (2013) menunjukkan bahwa Suatu perusahaan dengan nilai hutang yang tinggi cenderung lebih lama untuk melaporkan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena hutang dipercaya merupakan kabar yang tidak baik bagi para pembaca laporan keuangan.

Penelitian Kharisma, Muhamad, dan Andrieta (2015) juga mengemukakan hal yang sama bahwa Semakin tinggi tingkat solvabilitas suatu perusahaan maka menunjukkan bahwa tingkat hutang perusahaan tersebut tinggi selain itu juga menunjukkan bahwa semakin besar tingkat risiko keuangan yang akan dialami oleh kreditur maupun pemegang saham. Semakin besarnya tingkat

Solvabilitas suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung mendapatkan tekanan untuk menyediakan laporan keuangan secepatnya bagi pihak kreditor

Hal yang sama juga dikemukakan Budiadnyani dan Dwi Ratna (2015) dalam penelitiannya. Perusahaan yang mempunyai tingkat solvabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, kesulitan keuangan merupakan berita buruk bagi perusahaan dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya bila dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat solvabilitas rendah.

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

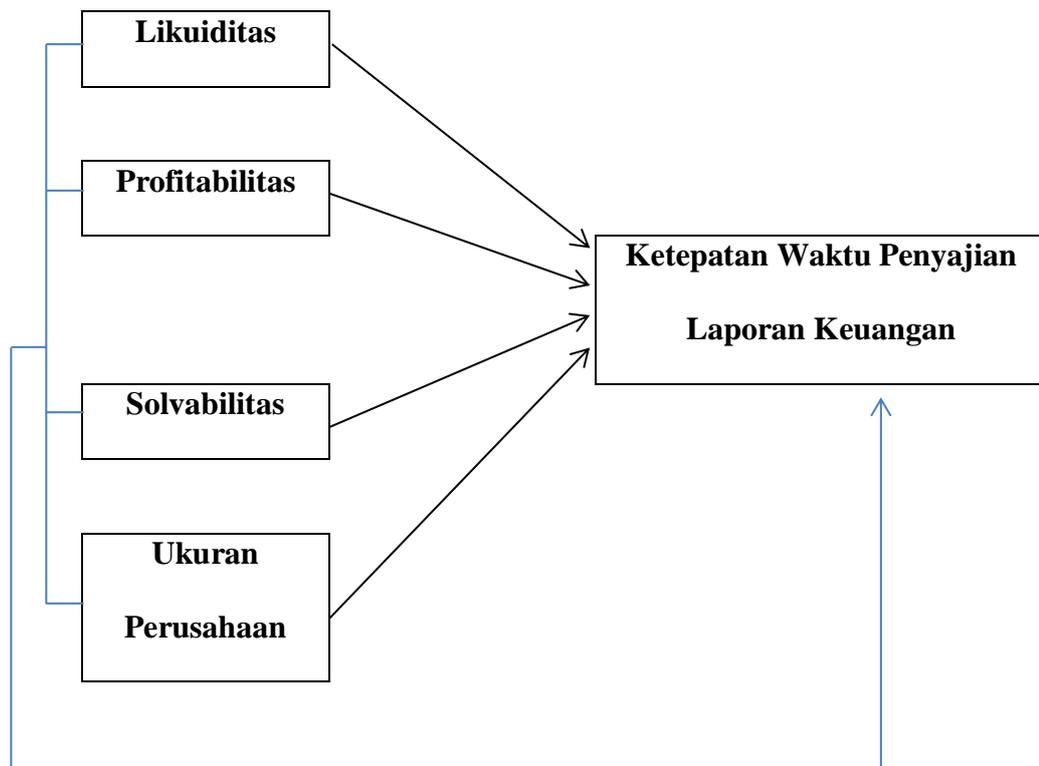
Salah satu atribut yang dapat dihubungkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.

Perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena beberapa alasan. Pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem

informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendalian intern yang kuat. Kedua, perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih dari investor dan *regulator* serta lebih menjadi sorotan publik. Secara rinci, perusahaan besar seringkali diikuti oleh sejumlah besar analis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya.

Penelitian Yusraini, Restu, dan Lhia (2010) mengemukakan perusahaan besar akan cenderung lebih menjaga *image* perusahaannya di depan masyarakat, untuk menjaga *image* tersebut maka perusahaan-perusahaan besar akan berusaha menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Pendapat yang sama juga dikemukakan aleysius (2012) dalam penelitiannya, Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai asset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item – item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Begitu juga Reza dan Dini (2015), yang dalam penelitiannya mengemukakan hal yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan diterima.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat digambarkan dengan model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas, maka dibuat hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

- Hipotesis :
1. Terdapat Pengaruh Likuiditas terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
 2. Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan
 3. Terdapat Pengaruh Solvabilitas terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

4. Terdapat Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
5. Terdapat Pengaruh Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan Ukuran perusahaan secara simultan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan

